

WHAT ARE THE DETERMINANTS OF DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE GERBANGKERTASUSILA NATIONAL STRATEGIC AREA VIA THE INTERNET?

APAKAH DETERMINAN DARI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL GERBANGKERTASUSILA VIA INTERNET?

Javelin Auffadiina¹, Dwi Suhartini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this research is as an effort to inspect the relationship between Disclosure of Local Government Financial Statements Via the Internet which is a dependent variable with independent variables, namely Regional Expenditure, Regional Wealth and Regional Prosperity using quantitative research methods. This research used secondary data with a total sample of 36 financial reports from six national strategic areas for six periods. Based on the results of testing the relationship between these variables, it was found that regional wealth has an influence on the disclosure of regional financial statements, while regional expenditure and original income do not have a direct impact on the disclosure of regional financial statements. In this study, it was also found that the completeness and ease of accessing financial statements in the Gerbangkertosusilo area was still inadequate and maximal.

Keywords: *Disclosure of Financial Statements via the Internet, Regional Expenditure, Regional Wealth and Regional Prosperity, Gerbangkertosusila*

ABSTRAK

Riset ini bertujuan sebagai bentuk upaya menguji hubungan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet yang merupakan variabel dependen dengan variabel independen, yakni Belanja Daerah, Kekayaan Daerah dan Kemakmuran Daerah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Riset ini mengaplikasikan data sekunder dengan total sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 36 laporan keuangan yang berasal dari enam daerah kawasan strategis nasional selama enam periode. Berdasarkan hasil pengujian hubungan antar variabel tersebut ditemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh pada proses pengungkapan laporan keuangan Kawasan, sedangkan Belanja dan Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki dampak langsung pada pengungkapan laporan keuangan Kawasan. Dalam penelitian ini pula ditemukan bahwa kelengkapan dan kemudahan mengakses laporan keuangan kawasan Gerbangkertosusilo masih belum memadai dan maksimal.

Kata Kunci: Pengungkapan Laporan Keuangan via Internet, Belanja, Kekayaan, Pendapatan Asli Daerah, Gerbangkertosusila.

PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah merupakan Lembaga yang bergerak menggunakan uang masyarakat dimana seharusnya difungsikan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat pula. Apapun output dan proses yang dihasilkan harus selalu diperiksa, Mulai dari Kesesuaian Kinerja Pemerintah dengan Undang – Undang, manfaat dari hasil kerjanya bagi

Masyarakat dan keberlanjutan dari Hasil dan manfaat tersebut karena Instansi Pemerintah dioperasikan menggunakan uang masyarakat sehingga sangat diperlukan Pertanggungjawaban Pelaku sistem pemerintahan setelah berakhirnya periode pemerintahan (*Bastian & Yuhertiana, 2021:1-3*).

Laporan Keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban yang ideal

bagi Pelaku sistem pemerintahan Daerah, Peran Laporan Keuangan sebagai sebuah dokumen pertanggungjawaban dan bukti lebih penting dari sebuah pernyataan lisan. Masyarakat selalu menuntut adanya Transparansi dalam pemerintahan karena bagi masyarakat Transparansi merupakan masalah kritis dalam penerapan sistem pemerintahan yang Demokratis, sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 pada tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pelaku sistem pemerintahan untuk pedoman pelaporan keuangan Pemerintah Daerah maupun pusat. Seiring berjalannya waktu,

Disahkannya Undang-Undang nomor 14 pada tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan mulai mudarnya kepercayaan masyarakat serta para pemakai laporan keuangan terhadap pemerintahan daerah meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu transparansi. Konsep-konsep yang diungkapkan merupakan bentuk tak terpisahkan pada teori, praktik, dan mekanisme laporan keuangan yang mana pengungkapan sendiri merupakan salah satu langkah yang diperlukan dalam proses penyajian informasi. Didalam Undang-undang tersebut, Informasi Publik perlu disalurkan dengan sistem yang efisien, biaya yang sewajarnya, serta cara yang sederhana agar mudah dipahami. Informasi Publik yang disediakan oleh pihak penyedia perlu perkembangan pada aspek sistem informasinya yang mana masih perlu dikembangkan sehingga Informasi Publik yang tersedia nantinya terkelola dengan baik dan efisien. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media

elektronik dan nonelektronik (Presiden Republik Indonesia, 2008).

Terdapat Beberapa faktor pendukung Pengungkapan Laporan Keuangan Pelaku sistem pemerintahan Daerah via Internet, sebagaimana pada penerapan Reformasi Birokrasi. Terdapat Beberapa faktor pendukung Pengungkapan Laporan Keuangan Pelaku sistem pemerintahan Daerah via Internet, salah satunya adalah penerapan Reformasi Birokrasi. Dua fase Reformasi Birokrasi masih dianggap gagal, Saat ini Indonesia sedang memasuki Reformasi Birokrasi Fase Ketiga (2020 – 2024) Dalam penerapannya, Reformasi Birokrasi Fase Ketiga ini diharapkan dapat mengubah paradigma dalam tata Kelola pemerintahan, terdapat delapan area perubahan dua diantaranya adalah Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penguatan Pengawasan.

Penelitian ini berfokus pada Kawasan Gerbangkertosusila (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan). Kawasan Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan yang berpusat di Surabaya (Nuraini, 2017).

Kawasan Gerbangkertosusila termasuk dalam wilayah Metropolitan terbesar kedua di Indonesia, yang mana telah diamanatkan dalam PP No 66 Tahun 2022, kawasan tersebut disahkan sebagai salah satu KSN. Wilayah Gerbangkertosusila menjadi salah satu kawasan yang berperan sebagai pusat perekonomian dan transportasi di Jawa Timur. Menjadi wilayah yang signifikan terhadap kepentingan nasional, Kawasan Gerbangkertosusila menjadi wilayah prioritas pada penataan ruangnya.

Berdasarkan Presiden Republik Indonesia (2017), kawasan ini telah dikembangkan dengan pembangunan

infrastruktur yang memadai pada bagian kereta api nasional dan jaringan jalan, pelabuhan dan bandar udara bertaraf internasional, hal tersebut juga berperan sebagai keunikan penelitian ini karena belum ditemukan penelitian terdahulu yang menggunakan Kawasan Strategis Nasional Gerbangkertosusila sebagai objek penelitian.

Belanja merupakan keseluruhan dari pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang akan mengeliminasi kelebihan dari jumlah Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran tersebut. Pembayaran Kembali tidak akan diperoleh oleh pelaku sistem pemerintahan. Belanja diakui berdasarkan berlangsungnya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan dilaporkan ketika pertanggungjawaban dari hasil pengeluaran tersebut ditetapkan oleh unit perbendaharaan. Akan tetapi jika berkaitan dengan badan layanan umum, belanja diakui dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait badan layanan umum sebagai rujukan.

Indonesia negara kepulauan seluas 1.904.569 km² memiliki 17.540 Pulau, dengan penduduk sebanyak 270.203.917 (2020), dengan enam agama yang diakui nasional, 31 Suku, 37 Provinsi dengan 416 Kabupaten dan 98 Kota yang tersebar, tentu ditemukan perbedaan antara Kabupaten/Kota satu dengan Kabupaten/Kota lainnya. Mulai dari Luas Wilayah, Mayoritas Pekerjaan, Struktur Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Kondisi Kesehatan Penduduk, Jumlah Aset, Pendapatan, Keadaan Politik, Geografi, Sosial, Budaya dan Lain – Lain. Aspek – Aspek tersebut tentu mempengaruhi Karakteristik daerah serta membutuhkan Perhatian, Peraturan dan Anggaran yang digunakan mengelola aset berbeda –

beda. Maka dari itu Karakteristik yang berbeda – beda di setiap daerah selalu mempengaruhi segala Aspek dalam suatu daerah tersebut terutama Ekonomi.

Berdasarkan Fenomena, Undang – Undang yang mengatur serta hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, Pelaku sistem pemerintahan Daerah masih belum sepenuhnya patuh pada undang – undang. Terdapat satu Kabupaten dari Tujuh Kawasan Strategis Nasional di Jawa Timur yang masih jauh dari kata patuh pada peraturan terkait, yaitu Kabupaten Bangkalan, Hanya dilakukan Publikasi LRA 2020 dari tujuh Laporan Keuangan di Internet, telah 15 tahun lamanya sejak diterbitkannya Undang – undang tentang keterbukaan informasi publik. Terlalu lama apabila membutuhkan waktu 15 tahun untuk beradaptasi dengan kebijakan yang ada terlebih untuk Kawasan Strategis Nasional.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, Penulis memiliki minat dan kepentingan untuk melaksanakan Penelitian dengan Judul “Pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet” Studi Empiris Kawasan Strategis Nasional Gerbangkertosusila 2016 – 2021.

Kajian Teori

Teori yang digunakan untuk mengembangkan penilitin ini yakni *Agency Theory* atau Teori Keagenan yang merupakan agenda yang menerangkan hubungan kontetual antara prinsipal dan agen, baik antara sebuah kelompok ataupun organisasi, maupun antara dua orang ataupun lebih. Pihak prinsipal berperan sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk menentukan sebuah keputusan yang akan dilakukan demi masa depan perusahaan serta mengalokasikan pembagian tanggung

jawab kepada pihak lain (Jensen & Meckling, 1976).

Agency Problem dapat dikaitkan dengan Organisasi Pelaku sistem pemerintahan dimana Masyarakat berperan sebagai Pemberi tanggungjawab dan Pemerintah berperan sebagai Agen penerima tanggungjawab. Sebagai Pemberi tanggungjawab masyarakat berhak mengetahui secara keseluruhan informasi mengenai pelaku sistem pemerintahan sebagai agen untuk memastikan apakah kinerja agen telah berhasil mencapai tujuan yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Pelaku sistem pemerintahan sebagai Agen menyertakan kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal yaitu masyarakat (Zimmerman, 1977).

Keterbukaan Informasi Publik telah diatur sejak Tahun 2008 dalam Undang – undang No. 14, Undang – undang ini diterbitkan sebagai penjamin hak dan kewenangan masyarakat untuk memastikan rencana keputusan publik, program, dan proses yang berkaitan dengan langkah pengambilan keputusan publik, serta alasan penentuan suatu keputusan publik. Keberadaan dari undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang terorganisir, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kondisi ini dapat terjadi apabila peningkatan atas pengelolaan dan penyajian informasi di lingkungan Badan Publik sehingga layanan informasi yang berkualitas akan dicapai.

Badan Publik diwajibkan untuk mengunggah informasi yang berhubungan dengan Badan Publik, seperti proses kinerja, kegiatan, dan progress yang berkaitan dengan Badan Publik. Selain itu kelengkapan laporan keuangan dan penjelasan lain yang

didasarkan pada perundang-undangan juga perlu disampaikan. Penyajian informasi tersebut juga harus dialokasikan dengan bentuk yang singkat dan jelas agar mudah dipahami oleh masyarakat awam dengan menggunakan bahasa Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 2008). Menurut (Drupadi, 2019) mengutip Styles dan Tennyson (2007) Menyebarluaskan Informasi menggunakan Internet adalah cara yang paling Cost Effective dan merupakan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Terdapat beberapa Penelitian sebelumnya yang membahas Pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet yang berperan sebagai Refrensi penulis dalam melakukan Penelitian. Namun terdapat beberapa perbedaan dari segi variabel maupun obyek penelitian. Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai acuan penulis dalam membuat Hipotesis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Diptyana, 2019) (Purwanti & Suparman, 2017) (Putri & Setiawan, 2022) menjumpai adanya pengaruh negatif oleh belanja daerah terhadap pengungkapan IFR. Merujuk pada pernyataan tersebut, hal ini dijumpai dapat terjadi karena kebijakan pelaku sistem pemerintahan daerah yang lebih fokus untuk menyalurkan layanan yang bersifat kontan atau langsung sehingga dampaknya akan langsung dirasakan oleh penduduk, daripada mendanai program yang bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi keuangan. Sedangkan penelitian (Masra & Sari, 2020) menyatakan bahwa *Internet Financial Reporting* menunjukkan dampak positif akibat dari belanja daerah yang mana belanja daerah tinggi dapat mendukung pelaku sistem pemerintahan daerah dalam proses

pengungkapan informasi keuangan yang tinggi pada laman elektronik pemerintah di daerahnya.

Penyebab dari kondisi tersebut adalah adanya belanja daerah suatu daerah yang cukup tinggi sehingga dapat tercermin pada tingkat penyajian informasi yang, sehingga belanja daerah otomatis akan berpengaruh pada *Internet Financial Reporting* (IFR).

H1: Belanja Daerah memiliki dampak terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.

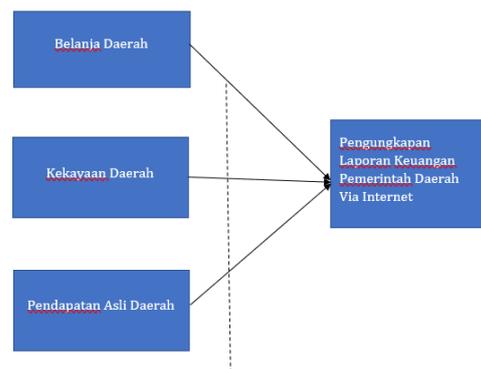
Daerah dengan ukuran keseluruhan aset yang lebih tinggi akan mendapatkan tuntutan yang lebih ketat ketika mengungkapkan informasi dalam LKPD, keinginan masyarakat untuk mengetahui apa yang dimiliki pelaku sistem pemerintahan akan semakin besar apabila diketahui bahwa pelaku sistem pemerintahan memiliki aset yang banyak. Seperti pada penelitian (Sarwono dkk., 2020) (Astuti dkk., 2022) (Hiola & Harun, 2021), pengujian memperlihatkan arah pengaruh yang positif bermakna bahwa pemerintah daerah yang berukuran besar akan lebih baik dalam proses pengelolaan dan penyajian tingkat pengungkapan LKPD, entitas dengan ukuran yang lebih tinggi dapat memperbesar tekanan oleh publik untuk memberikan laporan keuangannya secara menyeluruh.

H2: Kekayaan Daerah berdampak terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.

Pendapatan Asli daerah merupakan kemampuan yang dimiliki pelaku sistem pemerintahan dalam mengelola sumber daya milik daerahnya serta pendapatan lain yang berasal dari daerah tersebut. Semakin tinggi Pendapatan Asli daerah, keketatan

pengawasan dari masyarakat juga akan semakin tinggi karena terdapat rasa kecemasan oleh masyarakat akan terjadinya penyelewengan dana Hasil Penelitian milik (Finakesti dkk., 2022) (Kurniawati dkk., 2020) dan (Nurhidayati & Rahayu, 2020) mengatakan bahwa ditemukan pengaruh signifikan antara kekayaan pelaku sistem pemerintahan daerah kepada tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah PAD yang semakin besar mengakibatkan pemberian tekanan yang juga besar kepada pelaku sistem pemerintahan daerah untuk melakukan pengungkapan sesuai dengan Peraturan. Lalu rakyat selaku pembayar pajak dan retribusi tentu berhak untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang berkualitas terkait penggunaan dana mereka.

H3: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.



Gambar 1. Analisis Regresi Berganda

METODE PENELITIAN

Dengan mengaplikasikan Metode Kuantitatif, penelitian ini menggunakan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai variabel dependen yang dihitung menggunakan poin-poin yang ada dalam penelitian (Perdana & Achmad, 2018) sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Belanja Daerah,

Kekayaan Daerah dan Kemakmuraan Daerah. Populasi pada penelitian ini adalah Kawasan Strategis Nasional di Jawa Timur yaitu Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang berjumlah tujuh Kota/Kabupaten. Laporan yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016-2021 sehingga didapati tujuh Daerah dengan enam periode Laporan Keuangan, Total Populasi penelitian ini adalah 42 Laporan Keuangan.

Tidak tersedianya Informasi keuangan ataupun Website PPID dan BPKAD/BPKPD Kabupaten Bangkalan Membuat Kabupaten Bangkalan tidak dapat menjadi sampel studi ini sehingga data yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah enam daerah Kawasan Strategis Nasional selama enam periode, Total data Sampel dari Penelitian ini 36 Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang mana data yang digunakan pada riset ini tidak dijumpai secara langsung dari objek penelitian, melainkan didapatkan dari sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain.

Aplikasi eviews juga diaplikasikan pada penelitian ini untuk menganalisis regresi linier berganda. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan definisi operasional untuk mengamati sifat-sifat dasar yang menunjukkan definisi. Kaitannya dalam penelitian, definisi operasional digunakan untuk menguraikan dan mempertajam ruang lingkup penelitian atau konstruksi variabel yang akan diteliti (Pandoyo & Sofyan, 2018:161).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

ANALISIS DESKRPTIF

Tabel 1. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via

Internet Pemerintah Daerah Gerbangkertosusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021

Daerah	Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet (Indeks)						Rata - Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kab. Gresik	7	8	8	8	8	8	7.83
Kab Mojokerto	5	5	6	6	6	6	5.66
Kota Mojokerto	5	5	5	6	5	5	5.16
Kota Surabaya	8	8	8	8	8	8	8
Kab. Sidoarjo	5	7	7	7	7	7	6.66
Kab. Lamongan	5	5	5	5	5	5	5
Rata - rata	5.83	6.33	6.5	6.66	6.5	6.5	

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertosusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 dengan nilai rata-rata selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik sebesar 7.83, Kabupaten Mojokerto sebesar 5.66, Kota Mojokerto sebesar 5.16, Kota Surabaya sebesar 8, Kabupaten Sidoarjo sebesar 6.66 dan Kabupaten Lamongan sebesar 5.

Daerah yang memiliki Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet terendah selama periode penelitian adalah Kabupaten Lamongan dengan angka indeks lima, sedangkan yang memiliki Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet tertinggi dan melakukan pengungkapan laporan keuangan secara maksimal adalah Kota Surabaya dengan angka indeks sebesar delapan,

Tabel 2. Nilai Belanja Daerah Pemerintah Daerah Gerbangkertosusila Yang Memiliki Situs Penyedia Laporan Keuangan Periode 2016 Sampai Dengan 2021.

Daerah	Belanja Daerah (Rasio)						Rata - Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kab. Gresik	7.844731	7.880294	7.893524	7.999917	8.037718	7.801109	7.909549
Kab Mojokerto	7.723032	7.752039	7.772917	7.84761	7.785264	7.797008	7.776172
Kota Mojokerto	6.850889	6.60542	6.69476	6.74768	6.690109	6.860087	6.741491
Kota Surabaya	8.8751	8.976188	9.009072	9.122892	8.991217	8.964322	8.989798
Kab. Sidoarjo	8.202926	8.22906	8.340108	8.376717	8.396304	8.504331	8.341574
Kab. Lamongan	7.935963	7.911907	7.942316	7.963985	7.945605	8.989798	7.943699
Rata - rata	7.896494	7.892485	7.942116	8.0098	7.97437	7.981546	

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Tabel 2 menunjukkan dapat dijelaskan Belanja Daerah pada Pelaku

sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 dengan nilai rata-rata selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik dengan nilai rasio sebesar 7.909549, Kabupaten Mojokerto dengan nilai rasio sebesar 7.776172, Kota Mojokerto dengan nilai rasio sebesar 6.741491, Kota Surabaya sebesar dengan nilai rasio 8.989798, Kabupaten Sidoarjo dengan nilai rasio sebesar 8.341574 dan Kabupaten Lamongan dengan nilai rasio sebesar 7.943699.

Daerah yang memiliki Belanja Daerah terendah selama periode penelitian adalah Kota Mojokerto dengan nilai rasio belanja daerah sebesar 6.741491 Sedangkan yang memiliki Belanja Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya dengan nilai rasio belanja daerah sebesar 8.989798498 dan yang tertinggi kedua adalah Kabupaten Sidoarjo dengan nilai rasio belanja daerah sebesar 8.341574.

Tabel 3. Nilai Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021.

Daerah	Kekayaan Daerah (Rasio)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Rata-rata
Kab. Gresik	8.484984	8.514167	8.687638	8.749279	8.753397	8.731196 8.650443
Kab Mojokerto	8.618205	8.583069	8.648348	8.687014	8.691012	8.741082 8.661488
Kota Mojokerto	7.522032	7.483222	7.525548	7.586996	7.602716	7.619464 7.556663
Kota Surabaya	10.48886	10.62563	10.66346	10.70759	10.73444	10.75339 10.673061
Kab. Sidoarjo	8.913132	9.665877	9.762303	9.94242	9.964775	9.99005 9.706526
Kab. Lamongan	8.277951	8.335228	8.528916	8.586594	8.596875	8.646299 8.49531
Rata-rata	8.727527	8.867866	8.969502	9.043316	9.054203	9.08108

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Merujuk pada tabel 3 dapat dijelaskan Kekayaan Daerah pada Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 dengan nilai rata-rata rasio Kekayaan Daerah selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik sebesar 8.650443, Kabupaten Mojokerto sebesar 8.661488, Kota Mojokerto sebesar 7.556663, Kota Surabaya sebesar 10.673061, Kabupaten Sidoarjo sebesar 9.706526 dan

Kabupaten Lamongan sebesar 8.49531. Daerah yang memiliki Kekayaan Daerah atau total aset daerah dengan nilai paling rendah selama periode penelitian adalah Kabupaten Lamongan 8.49531 sedangkan yang memiliki Kekayaan Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya 10.67306 dan yang tertinggi kedua adalah Kabupaten Sidoarjo 9.706526.

Tabel 4. Nilai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021.

Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Rasio)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Rata-rata
Kab. Gresik	6.572954	6.770285	6.864075	6.888348	6.829426	6.438423 6.727251
Kab Mojokerto	6.103945	6.215648	6.30315	6.318968	6.286557	6.438423 6.277781
Kota Mojokerto	5.026902	5.183468	5.206805	5.261135	5.441898	5.546661 5.277811
Kota Surabaya	8.316352	8.549048	8.511756	8.5908	8.364033	8.461105 8.465515
Kab. Sidoarjo	7.196896	7.421662	7.425853	7.432434	7.494719	7.520736 7.422718
Kab. Lamongan	6.000102	6.061923	6.079017	6.156979	6.177425	6.404551 6.146666
Rata-rata	6.536192	6.700339	6.732443	6.774781	6.765676	6.808314

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertasusila yang memiliki situs penyedia Laporan Keuangan periode 2016 sampai dengan 2021 dengan nilai rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah selama periode tersebut yakni untuk Kabupaten Gresik sebesar 6.727251, Kabupaten Mojokerto sebesar 6.277781, Kota Mojokerto sebesar 5.277811, Kota Surabaya sebesar 8.465515, Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.422718 dan Kabupaten Lamongan sebesar 6.146666.

Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah selama periode penelitian adalah Kota Mojokerto sebesar 5.277811 Sedangkan yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 8.465515 dan yang tertinggi kedua adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 7.422718.

Dari beberapa pengujian diatas dapat dijelaskan beberapa hal melalui tabel 5 seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	OBS	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std Dev
Y	36	6.388889	6.0	8.0	5.0	1.293451
X1	36	7.950959	7.939140	9.122892	6.605420	0.687662
X2	36	8.957249	8.687326	10.75839	7.483222	1.017789

X3	36	6.719624	6.438423	8.590800	5.026902	1.035176
----	----	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Data diolah Penulis (2023)

a. Variabel Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet (Y)

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet dapat menunjukkan nilai tolak ukur yang berguna sebagai hasil dari seberapa besar transparansi yang telah dilakukan suatu daerah pada periode tertentu. Untuk mengetahui Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet dilakukan pengukuran indeks pada setiap daerah. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Via Internet (Y) memiliki nilai minimum sebesar 5,0; nilai maksimum sebesar 8,0; rata-rata sebesar 6,388889; median sebesar 6,0; dan standar deviasi sebesar 1,293451 dengan jumlah observasi sebanyak 36.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata serta median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai standart deviasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel dari data penelitian merupakan representasi yang baik untuk dijadikan penelitian. Nilai minimum dimiliki Kabupaten Mojokerto 2016-2017, Kota Mojokerto 2016-2018 dan 2020-2021, Kabupaten Sidoarjo 2016 dan Kabupaten Lamongan 2016-2021 artinya dari nilai tersebut menunjukkan Kabupaten Mojokerto 2016-2017, Kota Mojokerto 2016-2018 dan 2020-2021, Kabupaten Sidoarjo 2016 dan Kabupaten Lamongan 2016-2021 hanya melakukan Pengungkapan Laporan Keuangan sebesar 80%. Nilai Maksimum dimiliki Kabupaten Gresik 2017-2021 dan Kota Surabaya 2016-2021 dimana artinya kedua Daerah tersebut melakukan Pengungkapan Laporan Keuangan sepenuhnya pada periode terkait.

b. Variabel Belanja Daerah (X1)

Belanja Daerah merupakan angka yang menunjukkan Total anggaran yang digunakan untuk keperluan daerah baik operasional daerah, investasi dan modal maupun belanja tidak terduga, Untuk mengetahui total belanja daerah, dilakukan observasi pada salah satu laporan keuangan pelaku sistem pemerintahan daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, dan pada penelitian ini, sebelum dilakukan uji total belanja daerah harus diubah ke skala rasio terlebih dahulu. Belanja Daerah (X1), memiliki nilai paling kecil 6.605420; nilai paling besar 9.122892; rata-rata sebesar 7.950959; median sebesar 7.939140; dan standar deviasi 0.687662 dengan observasi sejumlah 36.

Data tersebut menunjukkan nilai standart deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata (mean) serta median, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel dari data penelitian merupakan representasi yang baik untuk dijadikan penelitian. Nilai Minimum dimiliki oleh Kota Mojokerto 2017 artinya Pelaku sistem pemerintahan Kota Mojokerto memiliki angka Belanja paling rendah dibanding lima Kabupaten Kota Lainnya, dengan kata lain Pemkot Mojokerto ditahun hanya membutuhkan 80% dari maksimal angka belanja daerah. Nilai Maksimum Belanja Daerah dimana merupakan angka Belanja Daerah milik Pemkot Surabaya 2019.

c. Variabel Kekayaan Daerah (X2)

Merupakan Variabel yang memproksikan karakteristik daerah dengan mengobservasi salah satu laporan keuangan pelaku sistem pemerintahan daerah yaitu neraca, dalam proses penelitian, Peneliti Fokus pada angka yang menunjukkan Total Aset yang dimiliki Pelaku sistem pemerintahan Daerah kemudian diubah menjadi skala pengukuran rasio. Kekayaan Daerah memiliki nilai minimum sebesar

7.483222; nilai maksimum sebesar 10.75839; rata-rata sebesar 8.957249; median sebesar 8.687326; dan standar deviasi 1.017789 dengan jumlah observasi sebanyak 36.

Dari data tersebut menunjukkan nilai rata-rata (mean) dan nilai median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai standart deviasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel dari data penelitian merupakan representasi yang baik untuk dijadikan penelitian. Nilai Minimum dimiliki oleh Kota Mojokerto 2017 artinya Pelaku sistem pemerintahan Kota Mojokerto memiliki Kekayaan daerah /Total Aset paling rendah dibanding lima Kabupaten Kota Lainnya, dengan kata lain Pemkot Mojokerto 2017 hanya memiliki 72% dari maksimal angka Aset Daerah, nilai Maksimum Kekayaan Daerah mencapai 10.75839 dimana merupakan angka Belanja Daerah milik Pemkot Surabaya 2021

d. Pendapatan Asli Daerah (X3)

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel kedua yang memproksikan karakteristik daerah dimana peneliti melakukan observasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Laporan Realisasi Anggaran dimana peneliti fokus pada angka Total Pendapatan Asli Daerah dilanjutkan dengan penyamaan skala pengukuran dengan menggunakan skala rasio. Variabel Pendapatan Asli Daerah, memiliki nilai minimum sebesar 5.026902; nilai maksimum sebesar 8.590800; rata-rata sebesar 6.719624; median sebesar 6.438423; dan standar deviasi sebesar 1.035176 dengan jumlah observasi sebanyak 36.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata serta median memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai standart deviasi sehingga dapat dikatakan bahwa sampel dari data

penelitian merupakan representasi yang baik untuk dijadikan penelitian. Nilai

Minimum dimiliki oleh Kota Mojokerto 2016 artinya Pelaku sistem pemerintahan Kota Mojokerto memiliki Pendapatan Asli Daerah paling rendah dibanding lima Kabupaten Kota Lainnya, dengan kata lain Pemkot Mojokerto 2016 hanya memiliki 58.8% dari maksimal angka pendapatan asli daerah. Nilai Maksimum Pendapatan Asli Daerah merupakan angka Pendapatan Asli Daerah milik Pemkot Surabaya 2021.

Uji Pemilihan Model

Tabel 6. Uji Chow

Cross Section F	Probability
Cross Section Chi-Square	0.0000

Merujuk hasil dari uji Chow pada tabel diatas ditemukan probabilitas bernilai 0.0000. Oleh karena itu, nilai probabilitas pada cross-section Chi-square < 0.05 menunjukkan model estimasi yang perlu digunakan berdasarkan ketentuan adalah *fixed effect model (FEM)*.

Tabel 7. Uji Hausman

Cross Section Random	Probability
	0.0000

Merujuk pada hasil dari uji Hausman pada tabel diatas dapat dipahami bahwa nilai probabilitas adalah 0.0000. Angka probabilitas pada cross-section Chi-square yang bernilai < 0.05 menunjukkan bahwa model estimasi yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan adalah *fixed effect model (FEM)*.

Mengacu pada hasil dari uji Chow dan hasil dari uji Hausman yang telah dilakukan, model estimasi yang dipilih adalah *fixed effect model (FEM)*. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa model *Fixed Effect* dapat menjawab tujuan penelitian ini serta menginterpretasikan regresi data panel daripada dua model

lainnya, yakni *Common Effect* dan *Random Effect*.

Tabel 8. Uji Normalitas

Variabel	Jarque-Bera	Probability
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet (Y), Belanja Daerah (X1), Kekayaan Daerah (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3).	0.399543	0.818918

Hasil uji normalitas dengan uji jarque-bera yang dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B untuk model Y adalah 0.818918. Karena nilai probabilitas model, model Y $p=0.818918$, lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi >0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa asumsi normalitas kedua model terpenuhi.

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

	Belanja Daerah (X1)	Kekayaan Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (X3)
Belanja Daerah (X1)	1.000000	0.150428	0.401832
Kekayaan Daerah (X2)	0.150428	1.000000	0.260988
Pendapatan Asli Daerah (X3)	0.401832	0.260988	1.000000

Data LN untuk X1 dan first difference untuk X2 dan X3, hasil tabel uji multikolinieritas menunjukkan bahwa korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0.15, X1 dengan X3 sebesar 0.40, dan X2 dengan X3 sebesar 0.26. Maka dapat disimpulkan pengujian tersebut tidak menunjukkan gejala multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini telah sesuai standar pengujian multikolinieritas di bawah nilai 0.8 (Ghozali, 2018).

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

Cross Obs*R-Squared	Probability
	0.839

Berdasarkan tabel hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji White untuk model Y dapat dilihat melalui nilai Prob Obs*R-Squared $0.084 > 0.05$ yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Uji Autokorelasi

F-Statistic	Probability
	0.1441

0.1441

Merujuk pada hasil pengujian yang ditunjukkan oleh table di atas, nilai probability chi-square sebesar 0.1441 lebih besar dari 0,05 yang mana dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Uji Durbin-Watson dapat menunjukkan asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) (Field, 2009). Pada Pemilihan Model, telah ditentukan bahwa penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*, dengan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std error	t-stat	Probabilitas
C	-1.0235	0.61802	-1.6561	0.1093
X1	0.049663	0.08999	0.55187	0.5856
X2	0.28599	0.06154	4.64665	0.0001
X3	-0.0124	0.0907	-0.1376	0.8915

Adapun Persamaan model regresi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = -1.023553 + 0.049663X_1 + 0.285997X_2 - 0.012495X_3 + e$$

Persamaan regresi data linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -1.023553 yang artinya menyatakan bahwa jika nilai variabel independen tetap maka nilai Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai Variabel dependen sebesar -1.023553
2. Koefisien regresi variabel Belanja Daerah (X1) adalah sebesar 0.049663, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Belanja Daerah (X1) mengalami kenaikan 1% maka nilai Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai Variabel dependen akan naik sebesar 0, 049663. Koefisien yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa terjadinya hubungan yang

searah antara Belanja Daerah dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.

3. Koefisien regresi variabel Kekayaan Daerah (X2) bernilai sebesar 0.285997, yang mana jika variabel independen lain nilainya tidak berubah dan Kekayaan Daerah (X2) mengalami kenaikan 1% maka, nilai Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai Variabel dependen akan naik sebesar 0, 285997. Koefisien yang ditunjukkan memiliki nilai positif yang berarti bahwa terjadi hubungan yang searah antara Kekayaan Daerah dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.
4. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) bernilai -0.012495, artinya jika variabel independen lain tidak mengalami perubahan nilai dan Pendapatan Asli Daerah (X3) mengalami kenaikan 1%, maka nilai Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet sebagai Variabel dependen akan turun sebesar -0.012495. Koefisien yang menunjukkan nilai negatif berarti terjadi hubungan yang berlawanan antara Kekayaan Daerah dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Via Internet.

Tabel 12. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std error	t-stat	Probabilitas
C	-1.0235	0.61802	-1.6561	0.1093
X1	0.049663	0.08999	0.55187	0.5856
X2	0.28599	0.06154	4.64665	0.0001
X3	-0.0124	0.0907	-0.1376	0.8915

- a. Variabel Belanja Daerah (X1)
Hasil Uji t Belanja Daerah diperoleh nilai t-statistik $0.586 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan ($0.586 > 0.05$) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet,
- b. Variabel Kekayaan Daerah (X2)

Hasil uji t Kekayaan Daerah memiliki nilai t-statistik $0.01 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekayaan Daerah memiliki pengaruh signifikan ($0.001 < 0.05$) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet.

- c. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X3)

Hasil Uji t Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai t-statistik $0.891 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan ($0.891 > 0.05$) terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah via Internet.

Tabel 13. Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	Probability
	0.921839

Mengacu pada hasil regresi nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) sebesar $R^2 = 0.921839$, dapat diartikan bahwa variabel independen, X1, X2 dan X3 dapat menjelaskan atau mempengaruhi asimetri informasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen Y sebesar 92.18%, sisanya sebesar 7.82% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar model penelitian.

Hasil

1. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan software eviews 12, yang mengacu pada tabel 2.9 diperoleh nilai probabilitas belanja daerah sebesar 0.586, sehingga hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak mempengaruhi proses pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet karena variabel bebas hanya memiliki pengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas < 0.005 , hal

tersebut menyebabkan hipotesis “Belanja Daerah memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet” ditolak.

2. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan software eviews 12, yang mengacu pada tabel 2.9 diperoleh nilai probabilitas kekayaan daerah sebesar 0.001, sehingga dapat dijumpai bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet karena variabel bebas akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas < 0.005 , hal tersebut menyebabkan hipotesis “Kekayaan Daerah memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet” diterima
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan software eviews 12, yang mengacu pada tabel 2.9 diperoleh nilai probabilitas pendapatan asli daerah sebesar 0.891, sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet karena variabel bebas akan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas < 0.005 , hal tersebut menyebabkan hipotesis “Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet” ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet

Merujuk pada penelitian ini, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via internet, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah yang tinggi tidak mencerminkan tingkat pelayanan yang tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena belanja daerah belum efisien dan efektif sehingga belum digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat secara keseluruhan.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet

Penelitian ini mendapati bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah via internet, Kondisi ini menyatakan bahwa pemerintah yang memiliki ukuran yang lebih besar biasanya diharapkan untuk lebih transparan ketika mengeluarkan hasil laporan keuangannya. Pemerintah daerah yang besar biasanya perlu mengelola keuangannya dengan lebih rumit dan mendapat pengawasan yang lebih besar. Maka dari itu, pemerintah daerah yang berperan dalam lingkup ukuran pemerintah yang lebih besar perlu membuat laporan keuangannya menjadi lebih memadai dan lebih menjelaskan semua informasi keuangannya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet

Hasil uji statistik pada variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet, bahwa pada periode tertentu PAD objek penelitian memiliki angka

PAD yang cenderung tinggi, namun Pengungkapan Laporan Keuangan masih stagnan sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam membuktikan pengaruh pengungkapannya hal tersebut terjadi akibat pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki pemda yang kurang efisien sehingga pelaku sistem pemerintahan daerah kurang memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, mengenai pengaruh Belanja Daerah dan Karakteristik Daerah yang mana diprosikan dengan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah via Internet, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah via internet artinya ketika angka belanja daerah pelaku sistem pemerintahan bernilai tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah via internet.
2. Kekayaan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah via internet, artinya semakin besar aset suatu daerah maka daerah tersebut melakukan pengungkapan laporan keuangan secara maksimal begitu juga apabila semakin kecil aset yang dimiliki suatu daerah maka daerah tersebut tidak secara maksimal melakukan pengungkapan laporan keuangan.
3. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah

via internet, artinya tinggi rendahnya angka pendapatan asli daerah pelaku sistem pemerintah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah via internet.

Implikasi

Merujuk pada hasil akhir dari ini menunjukkan bahwa terdapat implikasi, baik secara teoritis, maupun praktis yang tertera sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Belanja Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah via internet daerah gerbangkertosusila periode 2016-2021, apabila sesuai dengan teori keagenan, seharusnya belanja daerah mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan via internet, karena belanja yang digunakan tentu harus digunakan untuk memenuhi fasilitas yang menjadi hak masyarakat.

Kekayaan daerah berdampak terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah via internet daerah gerbangkertosusila periode 2016-2021, hal ini sesuai dengan penerapan teori keagenan, dimana adanya perubahan angka pada aset yang mendorong pelaku sistem pemerintahan untuk melakukan kewajibannya sebagai agen yang diberi tanggungjawab memenuhi hak masyarakat sebagai pemberi tanggungjawab.

Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki dampak terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah via internet daerah gerbangkertosusila periode 2016-2021, seharusnya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang mana berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat oleh Pemerintah Daerah maka tanggungjawab pelaku sistem

pemerintahan sebagai agen semakin besar untuk memenuhi hak masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk subyek yang menjalankan pemerintah terutama pelaku sistem pemerintahan daerah, provinsi maupun pemerintah pusat, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya pengungkapan laporan keuangan via internet merupakan hal yang penting dilakukan, walaupun Sebagian besar dari sampel telah melakukan hal tersebut, kelengkapan dan kemudahan mengaksesnya masih belum maksimal, apabila telah maksimal, akan ada pelaku sistem pemerintahan daerah yang mendapatkan nilai sempurna pada indeks pengukuran.

Keterbatasan

Baik dalam proses, maupun hasil dalam penelitian ini, tidak lepas dari beberapa keterbatasan penelitian yang tak dapat dihindari selama penelitian:

1. Penelitian ini menggunakan index pengukuran yang diambil dari penelitian terdahulu dalam mengukur pengungkapan laporan keuangan, untuk lebih memberikan hasil maksimal pada penelitian, sebaiknya indikator perlu ditambah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengukur pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Index pengukuran yang lebih mendetail dan lengkap.
2. Karena penelitian ini hanya terlimitasi pada tiga variabel, diharapkan bagi peneliti studi selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mengarah pada sektor publik. Misalnya: variabel dana alokasi

khusus, dana alokasi umum, dan belanja modal yang didukung dengan teori terbaru.

3. Akibat keadaan yang terbatas dalam metode penelitian, beberapa cara perhitungan variabel memungkinkan mengandung beberapa kelemahan. Diharapkan peneliti studi selanjutnya dapat mengaplikasikan uji analisis kuantitatif yang lain.

Saran

Penelitian ini memiliki ketebatasan, maka saran dari penelitian ini agar dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku sistem pemerintahan Daerah
Untuk Pelaku sistem pemerintahan Daerah disarankan untuk meningkatkan dan mempertegas pengawasan pada pengungkapan laporan keuangan via internet terutama *website* pelaku sistem pemerintahan daerah, *website* BPKAD atau BPKPD, dan *website* PPID, karena pengungkapan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan melalui internet merupakan cara yang paling efektif, efisien dan ekonomis untuk pengguna informasi, kemudahan mengakses dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pelaku sistem pemerintahan daerah karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku sistem pemerintahan untuk memenuhi hak masyarakat akan keterbukaan informasi. Pelaku sistem pemerintahan daerah juga diharapkan terus berupaya memperbaiki situs resmi dan mendesain situs dengan semenarik dan selengkap mungkin.

asil Perhitungan indeks menunjukkan bahwa seluruh Pelaku sistem pemerintahan Daerah Gerbangkertosusila yang menjadi sampel belum ada yang menyertakan akses ke Laporan Keuangan pada Beranda situs Pelaku sistem pemerintahan Daerah, ada baiknya bila akses Laporan Keuangan disertakan di beranda Situs Pemerintah Daerah karena hal tersebut memberikan kemudahan dalam Mengakses Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya
Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah sampel penelitian baik Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur maupun periode penelitian, kemudian menambah variabel lain yang diduga berpengaruh dan menambah data populasi penelitian baik melalui subjek yang diteliti ataupun periode yang diteliti, sehingga dapat menggeneralisasi hasil studi terkait dengan pengukuran pada periode yang singkat dihindari oleh peneliti.
3. Bagi Masyarakat
Pemerintah telah memberikan telah memberikan fasilitas keterbukaan informasi dan masyarakat berhak memperoleh informasi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan adanya fasilitas ini masyarakat seharusnya dapat memanfaatkan informasi keuangan. Hak tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui layanan kritik dan saran, perlu diketahui bahwasannya hal tersebut merupakan dorongan dalam meningkatkan pengungkapan laporan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah Masra, E., & Fitria Sari, V. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2). Online. [Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/23](http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/23)
- Astuti, W., Widaryanti, & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1).
- Bastian, I., & Yuhertiana, I. (2021). *Metode Penelitian Inovasi Akuntansi Sektor Publik* (1st Ed.). Bpfe.
- Diptyana, P. (2019). Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Internet Financial Reporting. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3).
- Drupadi, W. W. (2019). *Pengaruh Kompetensi Politik, Opini Audit dan Kemandirian Finansial Terhadap Aksesibilitas Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur*.
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1).
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *Jsap : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021>

- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* , 16.
- Nuraini, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*.
- Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020). Determinant Disclosure Of Lkpd In The Official Website Of The Provincial Government In Indonesia In 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2).
- Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan Dan Bisnis* . In Media.
- Perdana, P. P., & Achmad, K. (2018). Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetensi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Universitas Brawijaya*.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008*.
- Purwanti, R. E., & Suparman, L. (2017). The Determinants Transparency And Accessibility Of Internet Financial Reporting On Local Government In Indonesia. In *Papers*. [Http://inet.detik.com](http://inet.detik.com)
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (Ifr) Pada Pemerintah Daerah. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Jea)* (Vol. 4, Issue 2). Online. [Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Index](http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Index)
- Sarwono, A. E., Feni, I. M., & Sunarti. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Dengan Opini Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Unisri*.